

ABSTRAK

Penyetaraan jabatan sebagai sebuah produk hukum Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyetaraan jabatan bertujuan untuk menciptakan birokrasi sederhana, dinamis, lincah, efektif dan efisien untuk mendukung kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan penyetaraan jabatan ini di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Purwakarta tentunya memiliki dampak masalah dan tantangan tersendiri salah satu diantaranya terkait dengan mekanisme penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis atas implementasi kebijakan penyetaraan jabatan tersebut yang bertujuan agar dapat dipahami dalam pelaksanaan dari kebijakan tersebut, sehingga dapat menjadi masukan kepada pemangku kepentingan terkait. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan observasi. Hasil studi menunjukkan bahwa mekanisme penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional memerlukan tahapan-tahapan dalam penyusunannya sehingga di kemudian hari tidak terjadi kesalahan yang mempengaruhi implementasi kebijakan ini

Kata kunci: *penyetaraan jabatan, jabatan administrasi, jabatan pengawas, jabatan fungsional*

ABSTRACT

Equalization of positions as a legal product of Government Regulation Number 17 of 2020 as an amendment to Government Regulation Number 11 of 2017 concerning Management of Civil Servants and Regulation of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reform Number 28 of 2019 concerning Equalization of Administrative Positions into Functional Positions. Equalization of positions aims to create a simple, dynamic, agile, effective and efficient bureaucracy to support government performance to the community. In the implementation of this equalization policy within the Personnel and Human Resources Development Agency (BKPSDM) of Purwakarta Regency, it certainly has its own problems and challenges, one of which is related to the mechanism for equalizing the positions of administrators and supervisors into functional positions. Therefore, it is necessary to conduct an analysis of the implementation of the equalization policy in order to understand the implementation of the policy, so that it can be input to the relevant stakeholders. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques were carried out by documentation and observation studies. The results of the study indicate that the mechanism for equalizing the positions of administrators and supervisors into functional positions requires stages in its preparation so that in the future there will be no errors that affect the implementation of this policy.

Keywords: *equalization of positions, administrative positions, supervisory positions, functional positions*